

**LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023
DPM PTSP PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP
PROVINSI SULSEL
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan taufiq-Nya sehingga Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Semoga laporan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan/subkegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kami sadar bahwa laporan ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan pada masa yang akan datang, kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan kedepannya.

Makassar, April 2023

Kepala DPM & PTSP Prov. Sulsel,

Ir. H. Sulkaf S. Latief, MM

Pangkat: Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630424 198903 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1. TUJUAN DAN SASARAN POKOK RENJA

1.1 Tujuan

Tujuan organisasi perangkat daerah sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal & PTSP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023, adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif
2. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah
3. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan

1.2 Sasaran

1. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
3. Meningkatnya realisasi penanaman modal

1.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023, program

yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 berjumlah 6 (enam) program dengan total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 23.466.935.012,-

Adapun alokasi anggaran pada setiap program adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan jumlah anggaran Rp. 1.094.858.000,- dengan indikator kinerja Persentase Perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal, target pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, untuk mencapai target tersebut program ini melaksanakan 1 kegiatan yang terbagi ke dalam 3 sub kegiatan, adapun kegiatannya adalah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2. Program Promosi Penanaman Modal, dengan jumlah anggaran Rp. 1.381.488.400,-. Dengan indikator kinerja Jumlah Realisasi PMA dan Jumlah Realisasi PMDN, target pada tahun 2023 adalah Jumlah Realisasi PMA sebesar Rp. 4.5 triliun dan Jumlah Realisasi PMDN sebesar Rp. 5.67 triliun, untuk mencapai target tersebut program ini akan melaksanakan 1 kegiatan yang terbagi ke dalam 2 sub kegiatan, adapun kegiatannya adalah kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pengembangan kerjasama investasi dalam dan luar negeri.

3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan jumlah anggaran Rp. 772.559.900,- dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor, target pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, untuk mencapai target tersebut program ini akan melaksanakan 2 kegiatan yang terbagi ke dalam 4 sub kegiatan, adapun kegiatannya adalah kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan jumlah anggaran Rp. 1.387.908.700,- dengan indikator kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP, target pada tahun 2023 adalah sebesar 84%, untuk mencapai target tersebut program ini akan melaksanakan 1 kegiatan yang terbagi ke dalam 3 sub kegiatan, adapun kegiatannya adalah kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
5. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, dengan jumlah anggaran Rp. 150.000.000,- dengan indikator kinerja Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Valid, target pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, untuk mencapai target tersebut program ini akan melaksanakan 1 kegiatan yang terbagi ke dalam 1 sub

kegiatan, adapun kegiatannya adalah Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 16.829.442.212,- indikator kinerja program ini adalah Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah dengan target sebesar 100%, Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik dengan target 100%, Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP dengan target 100%, program ini memiliki 7 kegiatan yang terbagi ke dalam 25 sub kegiatan, adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.4 Indikator Kinerja Renja Tahun 2023

Keberhasilan suatu program perlu didukung dengan anggaran yang memadai, oleh sebab itu direncanakan pendanaan indikatif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

KODE			NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)
				TOLAK UKUR	TARGET	
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			23,466,935,012.0
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	18,680,120,012.0
01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	457,465,100.0
01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Peserta Forum PD	2 Dokumen 1 Dokumen 50 Peserta	206,541,600.0
01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan RKA	1 Dokumen 1 Koordinasi	21,865,000.0
01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan perubahan RKA	1 Dokumen 1 Koordinasi	31,098,000.0
01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan DPA	1 Dokumen 1 Koordinasi	40,595,000.0
01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan DPA perubahan	1 Dokumen 1 Koordinasi	33,290,200.0
01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dalam rangka penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja dan keuangan	1 Koordinasi 1 Dokumen	26,412,800.0

KODE			NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)
				TOLAK UKUR	TARGET	
01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan Jumlah Dokumen verifikasi PMPRB dan Zona Integritas	4 Dokumen 2 Dokumen	97,662,500.0
01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	12,576,444,261.0
01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPM PTSP yang dibayarkan gaji dan tunjangannya untuk tiap bulannya selama 1 tahun	86 ASN	12,410,007,061.0
01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi	1 Laporan	166,437,200.0
01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu	100 %	10,288,800.0
01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD	1 Laporan	6,000,000.0
01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	4,288,800.0
01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	100 %	274,557,000.0
01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	86 Pasang	143,400,000.0
01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 Laporan	88,657,000.0
01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dimonitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	86 ASN	42,500,000.0
01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	2,286,506,900.0
01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	13 Komponen	39,500,000.0
01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Peralatan	1,361,456,300.0
01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	6 Cetakan dan penggandaan	52,000,000.0
01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	7 Tamu	56,784,000.0
01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	3 Perjalanan	776,766,600.0
01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,335,857,951.0
01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan selama 1 tahun	12 Biaya	684,987,024.0
01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas non ASN (Kebersihan, Keamanan, Administrasi dan Tenaga Pendukung MPP)	30 Non ASN	1,650,870,927.0
01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	739,000,000.0
01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 dan 4 yang terbayarkan	15 Unit 15 Unit	109,000,000.0
01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	5 Unit	80,000,000.0
01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	50,000,000.0
01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	22 Unit	500,000,000.0
02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor	100 %	772,559,900.0
02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan	100 %	242,527,500.0

KODE			NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)
				TOLAK UKUR	TARGET	
02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda/regulasi mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang dibuat	1 Perda/Regulasi	197,570,500.0
02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi Produk Hukum	1 Laporan	44,957,000.0
02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase wilayah Sulawesi Selatan yang telah disusun kedalam peta potensi investasi provinsi	100 %	530,032,400.0
02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang Menyusun RUPM	25 Kab/kota	12,736,200.0
02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Sektor Unggulan Jumlah Mitra Bisnis Potensial	5 Peta 5 Mitra	517,296,200.0
03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA Jumlah Realisasi PMDN	4.5 Rp. Triliun 5.67 Rp. Triliun	1,381,488,400.0
03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase calon investor yang masuk Persentase calon investor yang masuk	100 %	1,381,488,400.0
03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen strategi promosi investasi yang dibuat	1 Dokumen	470,000,000.0
03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pameran/ kegiatan penanaman modal lainnya yang dilaksanakan/diikuti Jumlah koordinasi promosi dengan kab/kota Jumlah jenis sarana dan prasarana promosi	2 Event 24 Kab/kota 4 Jenis	911,488,400.0
04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	84 %	1,387,908,700.0
04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Cakupan ketersediaan dokumen perizinan dan non perizinan kewenangan provinsi yang diterbitkan	100 %	1,387,908,700.0
04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pemohon perizinan dan non perizinan yang dilayani	27000 Pemohon	884,538,300.0
04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	27000 Dokumen	265,499,000.0
04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan layanan konsultasi Jumlah Pelaksanaan Survey IKM Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan yang telah tindak lanjuti	110 Laporan 2 Pelaksanaan 10 Laporan	237,871,400.0
05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	100 %	1,094,858,000.0
05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	100 %	1,094,858,000.0
05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau Jumlah Koordinasi ke DPM PTSP Kab/Kota dalam rangka konsinyering data	1000 Perusahaan 24 Kab/kota	239,996,000.0
05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang dibina Jumlah Koordinasi ke DPM PTSP kab/kota terkait pembinaan	355 Perusahaan 24 Kab/kota	331,640,800.0
05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Perusahaan yang diawasi Jumlah Rekomendasi yang diberikan	70 Laporan 20 Rekomendasi	523,221,200.0

KODE			NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)
				TOLAK UKUR	TARGET	
06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	100 %	150,000,000.0
06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perizinan Berusaha	100 %	150,000,000.0
06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang dikelola /dikembangkan/dibangun	1 Sistem	150,000,000.0

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 tersebut di atas dirinci sesuai sumber pendanaannya pada APBD Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 23.466.935.012,-.

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA

PROGRAM/KEGIATAN RENJA SKPD

2.1 Capaian Kinerja

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bidang Penanaman Modal pada Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut;

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Renja Triwulan I Tahun 2023

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		KET ERANGA N
								I						
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor	%	100.0	650,000,000.0	772,559,900.0	25.0	72,427,340.0	25.0	72,427,340.0	25.0	9.37	
1.01		Penetapan Pemberian FasilitasInsentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan	%	100.0	236,000,000.0	242,527,500.0	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0		
1.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian FasilitasInsentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda/regulasi mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang dibuat	Perda/Regulasi	1.0	186,000,000.0	197,570,500.0	1.0	0.0	1.0	0.0	100.0		
1.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian FasilitasInsentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi Produk Hukum	Laporan	1.0	50,000,000.0	44,957,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Predikat Kinerja												
1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase wilayah Sulawesi Selatan yang telah disusun kedalam peta potensi investasi provinsi	%	100.0	414,000,000.0	530,032,400.0	20.0	72,427,340.0	20.0	72,427,340.0	20.0	13.66	
1.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang Menyusun RUPM	Kab/kota	25.0	55,000,000.0	12,736,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		KET ERA NGA N
								I						
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Sektor Unggulan	Peta	5.0	359,000,000.0	517,296,200.0	1.0	72,427,340.0	1.0	72,427,340.0	20.0	14.0	
			Jumlah Mitra Bisnis Potensial	Mitra	5.0			0.0		0.0		0.0		
		Predikat Kinerja												
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA	Rp. Triliun	4.50	1,800,000,000.0	1,381,488,400.0	0.70	70,595,500.0	0.70	187,384,900.0	15.56	13.56	
1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Realisasi PMDN	Rp. Triliun	5.67	1,800,000,000.0	1,381,488,400.0	0.05	70,595,500.0	0.05	187,384,900.0	0.88	13.56	
			Persentase calon investor yang masuk	%	100.0			10.0		10.0		10.0		
1.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen strategi promosi investasi yang dibuat	Dokumen	1.0	600,000,000.0	470,000,000.0	1.0	10,768,900.0	1.0	15,058,300.0	100.0	3.20	
1.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pameran/ kegiatan penanaman modal lainnya yang dilaksanakan/diikuti	Event	2.0	1,200,000,000.0	911,488,400.0	0.0	59,826,600.0	0.0	172,326,600.0	0.0	18.91	
		Predikat Kinerja	Jumlah koordinasi promosi dengan kab/kota	Kab/kota	24.0			1.0		1.0		4.17		
			Jumlah jenis sarana dan prasarana promosi	Jenis	4.0			1.0		1.0		25.0		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%	84.0	1,500,000,000.0	1,387,908,700.0	82.0	1,788,800.0	82.0	10,353,800.0	97.62	0.75	
1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan PerundanganUndangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Cakupan ketersediaan dokumen perizinan dan non perizinan kewenangan provinsi yang diterbitkan	%	100.0	1,500,000,000.0	1,387,908,700.0	22.0	1,788,800.0	22.0	10,353,800.0	22.0	0.75	
1.02	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pemohon perizinan dan non perizinan yang dilayani	Pemohon	27,00 0.0	1,100,000,000.0	884,538,300.0	26,00 4.0	0.0	26,00 4.0	8,565,000.0	96.31	0.97	
1.02	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Dokumen	27,00 0.0	200,000,000.0	265,499,000.0	26,00 4.0	1,788,800.0	26,00 4.0	1,788,800.0	96.31	0.67	
1.02	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan layanan konsultasi	Laporan	110.0	200,000,000.0	237,871,400.0	32.0	0.0	32.0	0.0	29.09		

[illegible]

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		KET ERA NGA N
								I						
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	%	100.0	19,405,796,855.0	18,680,120,012.0	0.0	1,944,978,651.0	0.0	4,012,911,552.0	0.0	21.48	
			Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	100.0			25.0		25.0		25.0		
			Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100.0			25.0		25.0		25.0		
1.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	100.0	494,000,000.0	457,465,100.0	25.0	16,866,200.0	25.0	16,866,200.0	25.0	3.69	
1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	2.0	220,000,000.0	206,541,600.0	1.0	1,817,500.0	1.0	1,817,500.0	50.0	0.88	
1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1.0	42,000,000.0	21,865,000.0	0.0	4,000,000.0	0.0	4,000,000.0	0.0	18.29	
			Jumlah Peserta Forum PD	Peserta	50.0			70.0		70.0		140.0		
			Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	Dokumen	1.0			0.0		0.0		0.0		
1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan RKA	Koordinasi	1.0	42,000,000.0	31,098,000.0	1.0		1.0		100.0		
1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Dokumen	1.0	42,000,000.0	40,595,000.0	0.0	0.0 6,135,000.0	0.0	0.0 6,135,000.0	0.0	15.11	
			Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan perubahan RKA	Koordinasi	1.0			0.0		0.0		0.0		

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		KET ERA NGA N
								I						
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	Dokumen	1.0			0.0		0.0		0.0		
1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan DPA	Koordinasi	1.0	42,000,000.0	33,290,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
			Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	Dokumen	1.0			0.0		0.0		0.0		
1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan DPA perubahan	Koordinasi	1.0	26,000,000.0	26,412,800.0	0.0	4,913,700.0	0.0	4,913,700.0	0.0	18.60	
			Jumlah koordinasi dalam rangka penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Koordinasi	1.0			1.0		1.0		100.0		
1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja dan keuangan	Dokumen	1.0	80,000,000.0	97,662,500.0	1.0	0.0	1.0	0.0	100.0		
			Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Dokumen	4.0			1.0		1.0		25.0		
		Predikat Kinerja	Jumlah Dokumen verifikasi PMPRB dan Zona Integritas	Dokumen	2.0			0.0		0.0		0.0		
1.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100.0	12,560,000,000.0	12,576,444,261.0	25.0	1,659,799,922.0 1,649,829,922.0	25.0	3,588,660,857.0 3,578,690,857.0	25.0	28.53 28.84	
1.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPM PTSP yang dibayarkan gaji dan tunjangannya untuk tiap bulannya selama 1 tahun	ASN	86.0	12,410,000,000.0	12,410,007,061.0	86.0	86.0	100.0				
1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Predikat Kinerja	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi	Laporan	1.0	150,000,000.0	166,437,200.0	1.0	9,970,000.0	1.0	9,970,000.0	100.0	5.99	
1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu	%	100.0	12,000,000.0	10,288,800.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0		
1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD	Laporan	1.0	6,000,000.0	6,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1.0	6,000,000.0	4,288,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		KET ERA NGA N
								I						
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Predikat Kinerja												
1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	%	100.0	368,000,000.0	274,557,000.0	25.0	2,985,000.0	25.0	2,985,000.0	25.0	1.09	
1.05	3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Pasang	86.0	250,000,000.0	143,400,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1.05	5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Laporan	1.0	68,000,000.0	88,657,000.0	0.0	2,985,000.0	0.0	2,985,000.0	0.0	3.37	
		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumah pegawai yang dimonitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	ASN	86.0	50,000,000.0	42,500,000.0	86.0	0.0	86.0	0.0	100.0		
		Predikat Kinerja												
1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%	100.0	2,378,296,854.0	2,286,506,900.0	25.0	21,393,100.0	25.0	21,393,100.0	25.0	0.94	
1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Komponen	13.0	50,000,000.0	39,500,000.0	4.0	4,875,000.0	4.0	4,875,000.0	30.77	12.34	
1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan	12.0	1,100,000,000.0	1,361,456,300.0	3.0	1,220,100.0	3.0	1,220,100.0	25.0	0.09	
1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Cetakan dan penggandaan	6.0	72,000,000.0	52,000,000.0	2.0	0.0	2.0	0.0	33.33		
1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	Tamu	7.0	50,000,000.0	56,784,000.0	1.0	6,732,000.0	1.0	6,732,000.0	14.29	11.86	
1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Perjalanan	3.0	1,106,296,854.0	776,766,600.0	1.0	8,566,000.0	1.0	8,566,000.0	33.33	1.10	
		Predikat Kinerja												
1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0	1,620,000,000.0	2,335,857,951.0	25.0	228,225,329.0	25.0	367,297,295.0	25.0	15.72	
1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periodesasi jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan selama 1 tahun	Biaya	12.0	620,000,000.0	684,987,024.0	3.0	68,203,589.0	3.0	128,664,685.0	25.0	18.78	

[illegible]

2.2 Program yang dilaksanakan

Realisasi anggaran hingga akhir Maret tahun 2023 atau periode triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.089.790.291,- atau sebesar 8,91%. Untuk realisasi fisiknya sebesar 10,06%. Adapun rincian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 berdasarkan Tabel 2.1 adalah sebagai berikut;

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan jumlah anggaran Rp. 1.094.858.000,- dan belum ada terealisasi di Triwulan I tahun 2023. Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal dengan target pada tahun 2023 sebesar 100% dan telah direalisasikan sebesar 20%.
2. Program Promosi Penanaman Modal, dengan jumlah anggaran Rp. 1.381.488.400,- dan direalisasikan sebesar Rp. 70.595.500,- atau sebesar 5,11 %, Indikator kinerja program ini adalah Jumlah realisasi PMA dan jumlah realisasi PMDN dengan target dan realisasi pada tahun 2023 adalah target PMA sebesar Rp. 4.5 triliun direalisasikan Rp. 0,70 triliun dan PMDN sebesar Rp. 5.67 triliun direalisasikan Rp. 0,05 triliun.
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan jumlah anggaran Rp. 772.559.900,- dan direalisasikan sebesar Rp. 72.427.340,- atau sebesar 3,29% , Indikator kinerja program ini adalah Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor dengan target pada tahun 2023 sebesar 100% dan direalisasikan sebesar 25%.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan jumlah anggaran Rp. 1.387.908.700,- dan direalisasikan sebesar Rp. 1.788.800,- atau sebesar 5,91%. Indikator kinerja program ini Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP dengan target pada tahun 2023 sebesar 84% dan direalisasikan sebesar 82%.
5. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, dengan jumlah anggaran Rp. 150.000.000,- dan belum ada realisasi sampai saat ini. Indikator kinerja program ini adalah Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal dengan target pada tahun 2023 sebesar 100% dan direalisasikan sebesar 15%.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 18.680.120.012,- dan direalisasikan sebesar Rp. 1.944.978.651,- atau sebesar 10,41%. Indikator kinerja program ini adalah Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP dengan target 100% (Realisasi pada akhir tahun Renja), berikutnya adalah Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik dengan target 100% dan direalisasikan sebesar 25%, dan yang terakhir adalah Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% dan direalisasikan sebesar 25%.

BAB III

PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENSTRA

SKPD DAN RENJA OPD

3.1 Perbandingan Antara Renstra dan Renja OPD

Berikut ini merupakan tabel perbandingan jumlah anggaran program, kegiatan dan sub kegiatanyang telah direncanakan ppada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 dan Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2023:

Tabel 3.1

Perbandingan Antara Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RENSTRA dan RENJA

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	RENJA	
					TARGET	RP				TARGET	RP
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimamfaatkan oleh Investor	%	100.0	650,000,000.0	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimamfaatkan oleh Investor	%	100.0	650,000,000.0
1.01		Penetapan Pemberian FasilitasInsentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase investor yang mendapatkan pemberian fasilitasi/insentif yang menjadi kewenangan	%	100.0	236,000,000.0	Penetapan Pemberian FasilitasInsentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase investor yang mendapatkan pemberian fasilitasi/insentif yang menjadi kewenangan	%	100.0	236,000,000.0
1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian FasilitasInsentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda/regulasi mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang dibuat	Perda/Regulasi	1.0	186,000,000.0	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian FasilitasInsentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda/regulasi mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang dibuat	Perda/Regulasi	1.0	186,000,000.0
1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian FasilitasInsentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi Produk Hukum	Laporan	1.0	50,000,000.0	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian FasilitasInsentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi Produk Hukum	Laporan	1.0	50,000,000.0
1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase wilayah Sulawesi Selatan yang telah disusun kedalam peta potensi investasi provinsi	%	100.0	414,000,000.0	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase wilayah Sulawesi Selatan yang telah disusun kedalam peta potensi investasi provinsi	%	100.0	414,000,000.0
1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Sektor Unggulan	Peta	5.0	359,000,000.0	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Sektor Unggulan	Peta	5.0	359,000,000.0
			Jumlah Mitra Bisnis Potensial	Mitra	5.0			Jumlah Mitra Bisnis Potensial	Mitra	5.0	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA	Rp. Triliun	4.5	1,800,000,000.0	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA	Rp. Triliun	4.5	1,800,000,000.0
			Jumlah Realisasi PMDN	Rp. Triliun	5.67			Jumlah Realisasi PMDN	Rp. Triliun	5.67	
1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase calon investor yang masuk	%	100.0	1,800,000,000.0	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase calon investor yang masuk	%	100.0	1,800,000,000.0
1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen strategi promosi investasi yang dibuat	Dokumen	1.0	600,000,000.0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen strategi promosi investasi yang dibuat	Dokumen	1.0	600,000,000.0
1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pameran/ kegiatan penanaman modal lainnya yang dilaksanakan/diikuti	Event	2.0	1,200,000,000.0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pameran/ kegiatan penanaman modal lainnya yang dilaksanakan/diikuti	Event	2.0	1,200,000,000.0
			Jumlah koordinasi promosi dengan kab/kota	Kab/kota	24.0			Jumlah koordinasi promosi dengan kab/kota	Kab/kota	24.0	

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	RENJA	
					TARGET	RP				TARGET	RP
			Jumlah jenis sarana dan prasarana promosi	Jenis	4.0			Jumlah jenis sarana dan prasarana promosi	Jenis	4.0	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%	84.0	1,500,000,000.0	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%	84.0	1,500,000,000.0
1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan PerundanganUndangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Cakupan ketersediaan dokumen perizinan dan non perizinan kewenangan provinsi yang diterbitkan	%	100.0	1,500,000,000.0	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan PerundanganUndangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Cakupan ketersediaan dokumen perizinan dan non perizinan kewenangan provinsi yang diterbitkan	%	100.0	1,500,000,000.0
1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pemohon perizinan dan non perizinan yang dilayani	Pemohon	27,000.0	1,100,000,000.0	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pemohon perizinan dan non perizinan yang dilayani	Pemohon	27,000.0	1,100,000,000.0
1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Dokumen	27,000.0	200,000,000.0	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Dokumen	27,000.0	200,000,000.0
1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan layanan konsultasi	Laporan	100.0	200,000,000.0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan layanan konsultasi	Laporan	100.0	200,000,000.0
			Jumlah Pelaksanaan Survey IKM	Pelaksanaan	2.0			Jumlah Pelaksanaan Survey IKM	Pelaksanaan	2.0	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan yang telah ditindak lanjuti	Laporan	10.0			Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan yang telah ditindak lanjuti	Laporan	10.0	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	%	100.0	600,000,000.0	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	%	100.0	600,000,000.0
1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	100.0	600,000,000.0	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	100.0	600,000,000.0
1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau	Perusahaan	1,000.0	200,000,000.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau	Perusahaan	1,000.0	200,000,000.0
			Jumlah Koordinasi ke DPM PTSP Kab/Kota dalam rangka konsinyering data	Kab/kota	24.0			Jumlah Koordinasi ke DPM PTSP Kab/Kota dalam rangka konsinyering data	Kab/kota	24.0	
1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang dibina	Perusahaan	355.0	200,000,000.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang dibina	Perusahaan	355.0	200,000,000.0
			Jumlah Koordinasi ke DPM PTSP kab/kota terkait pembinaan	Kab/kota	24.0			Jumlah Koordinasi ke DPM PTSP kab/kota terkait pembinaan	Kab/kota	24.0	
1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Perusahaan yang diawasi	Laporan	70.0	200,000,000.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Perusahaan yang diawasi	Laporan	70.0	200,000,000.0
			Jumlah Rekomendasi yang diberikan	Rekomendasi	20.0			Jumlah Rekomendasi yang diberikan	Rekomendasi	20.0	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	%	100.0	300,000,000.0	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	%	100.0	300,000,000.0
1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perizinan Berusaha	%	100.0	300,000,000.0	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perizinan Berusaha	%	100.0	300,000,000.0

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	RENJA	
					TARGET	RP				TARGET	RP
1.01	01	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang dikelola /dikembangkan/dibangun	Sistem	1.0	300,000,000.0	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang dikelola /dikembangkan/dibangun	Sistem	1.0	300,000,000.0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	%	100.0	19,405,796,855.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	%	100.0	19,405,796,855.0
			Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	100.0			Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	100.0	
			Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100.0			Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100.0	
1.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	100.0	494,000,000.0	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	100.0	494,000,000.0
1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	2.0	220,000,00.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	2.0	220,000,00.0
			Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1.0			Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1.0	
			Jumlah Peserta Forum PD	Peserta	50.0			Jumlah Peserta Forum PD	Peserta	50.0	
1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	Dokumen	1.0	42,000,000.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	Dokumen	1.0	42,000,000.0
			Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan RKA	Koordinasi	1.0			Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan RKA	Koordinasi	1.0	
1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Dokumen	1.0	42,000,000.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Dokumen	1.0	42,000,000.0
			Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan perubahan RKA	Koordinasi	1.0			Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan perubahan RKA	Koordinasi	1.0	
1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	Dokumen	1.0	42,000,000.0	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	Dokumen	1.0	42,000,000.0
			Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan DPA	Koordinasi	1.0			Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan DPA	Koordinasi	1.0	
1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	Dokumen	1.0	42,000,000.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	Dokumen	1.0	42,000,000.0
			Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan DPA perubahan	Koordinasi	1.0			Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan DPA perubahan	Koordinasi	1.0	
1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dalam rangka penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Koordinasi	1.0	26,000,000.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dalam rangka penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Koordinasi	1.0	26,000,000.0
			Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja dan keuangan	Dokumen	1.0			Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja dan keuangan	Dokumen	1.0	

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	RENJA	
					TARGET	RP				TARGET	RP
1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Dokumen	4.0	80,000,000.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Dokumen	4.0	80,000,000.0
			Jumlah Dokumen verifikasi PMPRB dan Zona Integritas	Dokumen	2.0			Jumlah Dokumen verifikasi PMPRB dan Zona Integritas	Dokumen	2.0	
1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100.0	12,560,000,000.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100.0	12,560,000,000.0
1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPM PTSP yang dibayarkan gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	ASN	86.0	12,410,000,000.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPM PTSP yang dibayarkan gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	ASN	86.0	12,410,000,000.0
1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi	Laporan	1.0	150,000,000.0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi	Laporan	1.0	150,000,000.0
1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu	%	100.0	12,000,000.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu	%	100.0	12,000,000.0
1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD	Laporan	1.0	6,000,000.0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD	Laporan	1.0	6,000,000.0
1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1.0	6,000,000.0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1.0	6,000,000.0
1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	%	100.0	368,000,000.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	%	100.0	368,000,000.0
1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Pasang	86.0	250,000,000.0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Pasang	86.0	250,000,000.0
1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Laporan	1.0	68,000,000.0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Laporan	1.0	68,000,000.0
1.05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumah pegawai yang dimonitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	ASN	86.0	50,000,000.0	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumah pegawai yang dimonitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	ASN	86.0	50,000,000.0
1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%	100.0	2,378,296,854.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%	100.0	2,378,296,854.0
1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Komponen	13.0	50,000,000.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Komponen	13.0	50,000,000.0
1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan	12.0	1,100,000,000.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan	12.0	1,100,000,000.0
1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Cetakan dan penggandaan	6.0	72,000,000.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Cetakan dan penggandaan	6.0	72,000,000.0
1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	Tamu	7.0	50,000,000.0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	Tamu	7.0	50,000,000.0
1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Perjalanan	3.0	1,106,296,854.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Perjalanan	3.0	1,106,296,854.0
1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0	1,620,000,000.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0	1,620,000,000.0

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	RENSTRA		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	RENJA	
					TARGET	RP				TARGET	RP
1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periodesasi jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan selama 1 tahun	Biaya	12.0	620,000,000.0	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periodesasi jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan selama 1 tahun	Biaya	12.0	620,000,000.0
1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas non ASN (Kebersihan, Keamanan, Administrasi dan Tenaga Pendukung MPP)	Non ASN	30.0	1,000,00,000.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas non ASN (Kebersihan, Keamanan, Administrasi dan Tenaga Pendukung MPP)	Non ASN	30.0	1,000,00,000.0
1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100.0	1,973,500,001.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100.0	1,973,500,001.0
1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	15.0	150,000,000.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	15.0	150,000,000.0
			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 dan 4 yang terbayarkan	Unit	15.0			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 dan 4 yang terbayarkan	Unit	15.0	
1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	5.0	123,500,001.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	5.0	123,500,001.0
1.09	09	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara	Unit	1.0	900,000,000.0	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara	Unit	1.0	900,000,000.0
1.09	10	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	22.0	800,000,000.0	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	22.0	800,000,000.0

BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Tahun Anggaran 2023, maka faktor penghambat pencapaian kinerja yang dirumuskan dibagi menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Sistem perizinan berusaha yang saat ini menggunakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) masih dalam tahapan penyempurnaan sehingga masih sering ditemukan kendala dalam penggunaannya.
2. Aplikasi Perizinan Khusus Kewenangan Daerah yaitu “PROPTSP” yang digunakan untuk melengkapi sistem OSS RBA masih memiliki banyak kekurangan dan masih perlu disempurnakan.
3. Keterbatasan anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, seperti Penyediaan SPD dari BKAD yang tidak sesuai dengan anggaran kas, dan tidak memadainya anggaran perjalanan dinas untuk melakukan peninjauan lapangan
4. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 3,9 Miliar masih dalam tahap verifikasi dan menunggu persetujuan dari Kemenkeu.
5. Sarana dan prasarana pelayanan publik yaitu penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) belum memadai untuk tahun 2023, sehingga penyempurnaannya menunggu tahun anggaran berikutnya.
6. Kurangnya ketersediaan data sektoral terkait potensi dan peluang usaha daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah kab/kota.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat.

5.2. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan tentunya tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya, sehingga Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi

Selatan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 dan di masa mendatang. Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.

Makassar, April 2023

Kepala DPM & PTSP Prov. Sulsel,

Ir. H. Sulkaf S. Latief, MM

Pangkat: Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630424 198903 1 010